

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Vol. 1 No. 2 Juli 2021

Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan

(Studi Kasus Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dewan Pimpinan Cabang
Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gresik dalam Pemilu 2019)

Mukaukabah Alwadlo

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Dalam rekrutmen yang dilakukan partai politik sendiri yakni untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana makna strategi rekrutmen PPP dalam meningkatkan partisipasi perempuan menjadi caleg perempuan pada pemilu 2019 studi kasus DPC PPP Gresik, Penyusunan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, strategi rekrutmen caleg yang dilakukan PPP Gresik adalah 1) membentuk Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2), 2) sosialisasi pendaftaran caleg, 3) penentuan nomor urut dan dapil caleg pembekalan caleg, 4) forum konsultasi pemenangan caleg, 5) bantuan alat peraga kampanye, 6) penyediaan saksi per TPS, 7) evaluasi progress report caleg. Partai politik akan melakukan rekrutmen sebaik baiknya dan seketat mungkin sehingga bakal caleg yang lolos benar – benar terbaik. Selain itu terdapat mekanisme khusus untuk mendaftar ke DPC yang paling penting yakni setiap caleg yang mau mendaftar harus beragama islam, bisa memperjuangkan visi misi ke masyarakat. Sedangkan faktor salah satu penghambat Strategi Rekrutmen Caleg Perempuan yakni minimnya minat perempuan untuk mencalonkan diri, minimnya pengetahuan dan keterampilan berpolitik, kurangnya dana kampanye, minimnya jaringan social dan keterbatasan waktu kampanye dan hambatan eksternal antara lain. Pandangan masyarakat terhadap caleg perempuan masih kurang baik atau masih meremehkan adanya pemimpin perempuan.

Kata Kunci: Strategi, Rekrutmen, Calon Legislatif Perempuan

Pendahuluan

Kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mengenai partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.¹

Menurut Samuel P. Huntington menyatakan bahwa sebuah sistem politik sudah dapat dikatakan demokrasi bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.² Pemilu juga merupakan salah satu sarana dan prasarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan.

Partai politik juga merupakan bagian dari sistem politik yang paling bertanggung jawab dalam menghasilkan para pemimpin-pemimpin yang berkualitas untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas tersebut maka perlu dikembangkan sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik yang baik dan benar. Bagus atau tidaknya sistem kaderisasi suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan kader suatu partai dalam bersaing dengan kader yang berasal dari partai lain dengan catatan persaingan yang terjadi adalah persaingan yang sehat.

Partai politik salah satu faktor pendorong pertumbuhan jumlah perempuan di dunia politik. Namun kita ketahui saat ini partai politik malah menjadi faktor penghambat bagi pertumbuhan jumlah perempuan pada perpolitikan di Indonesia saat ini. Banyak alasan yang di kemukakan oleh partai politik kepada publik untuk menutupi permasalahan gender pada perpolitikan sehingga dapat dijadikan alasan pembenarannya. Salah satu alasan yang diutarakan oleh partai politiknya

¹ Mirriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) Hlm.461.

² Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, (Jakarta: Grafitri, 1997), Hlm.5-6.

minimnya perempuan yang memiliki kredibilitas dan intelektual yang memadai padahal jika melihat di lapangan banyak perempuan yang mempunyai *kredibilitas* dan *intelektual* yang bagus bahkan melebihi kaum laki-laki. Fenomena ini terjadi dan dirasakan oleh kaum perempuan hampir diseluruh Indonesia mereka merasakan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh partai politik terhadap kaumny. ³

Untuk merealisasikan tuntutan ini pemerintah membuat undang-undang untuk mengatur keterlibatan kaum perempuan untuk menjadi anggota legislatif melalui partai politik yang ada. Terdapat Undang-Undang Republik Indonesia nomer 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terdapat pasal 172 yakni tentang peserta pemilu untuk pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota adalah partai politik. Pasal 173 menjelaskan tentang yang *pertama* partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU yang *kedua* partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan contohnya memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik dan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik pusat dan yang *ketiga* partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana di maksud pada ayat 2 tidak di verifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.⁴

Dengan memperhatikan hasil Sensus Penduduk Indonesia pada tahun 2010, bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah sejumlah 237.556.363 orang, dengan 119.507.580 orang terdiri dari laki-laki dan 118.048.783 orang terdiri dari perempuan. Dengan demikian, rasio presentase perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan berada dalam kisaran 51% banding 49%.

³ Dr. Muhadam Labodo/ Teguh Ilham, S. Stp. *Partai Politik Dan System Pemilihan Umum Di Indonesia*. (Jakarta:PT Gremedia Pustaka Utama 2013) Hal 231-232.

⁴<http://www.hukumonline.com/pusatdata>.

Tabel 1.1.

Jumlah Perempuan di DPRD kab Gresik

Pemilu	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Gresik	Jumlah Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Gresik	Persentase
1999	50	2	4%
2004	50	3	6%
2009	50	9	18%
2014	50	5	10%

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dan Komisi Pemilihan Umum Gresik.

Dari tabel di atas 1.1. menjelaskan tentang jumlah perempuan legislatif di Kabupaten Gresik. Semenjak pasca Orde Baru sampai sekarang, terjadi pasang surutnya jumlah anggota legislatif perempuan. Bisa kita lihat dari tahun 1999, hanya 2 perempuan yang duduk di kursi legislatif dan hanya 4,00 persen, tahun berikutnya yakni tahun 2004 ada sedikit peningkatan menjadi 6,00 persen dan yang menduduki 3 anggota legislatif, di tahun 2009 terjadi pelonjakan yang cukup tinggi yakni 9 anggota legislatif perempuan kalo di persenkan 18,00 persen, cukup tinggi di bandingkan tahun tahun sebelumnya, dan yang terakhir yakni di tahun 2014 terjadi sedikit penurunan yakni 5 anggota legislatif perempuan atau 10,00 persen saja. Dari 4 periode ini bisa kita lihat kurangnya partisipasi perempuan dalam legislatif saat ini.

Tabel 1.2.

Jumlah Perempuan PPP di DPRD Gresik

Pemilu	Jumlah anggota DPRD kabupaten Gresik	Jumlah anggota DPRD perempuan kabupaten Gresik dari PPP	Persentase
1999	50	-	
2004	50	-	
2009	50	1	2%

2014	50	1	2%
------	----	---	----

Sumber: Sekretariat DPC PPP Gresik

Bisa kita lihat tabel di atas yakni tabel 1.2. menjelaskan pasang surutnya persentase partisipasi perempuan di Partai Persatuan Pembangunan. Di tahun pasca Orde Baru, Partai Persatuan Pembangunan tidak sama sekali mendapatkan kursi di DPRD Gresik, sama juga di tahun 2004 Partai Persatuan Pembangunan juga tidak sama sekali mendapatkan kursi perempuan. Beda di tahun 2009, PPP terjadi peningkatan meskipun hanya 1 kursi perempuan, dan di tahun 2014 saat ini juga hanya 6 kursi perempuan kalo di persentasekan hanya 2,00 persen dan di tahun ini PPP optimis mendapatkan kursi lebih banyak di karnakan juga terdapat jumlah keterwakilan perempuan 30%.

Dan di sini tugas setiap partai politik mencari perempuan yang mempunyai intelektual dan mempunyai kebasisan dalam cara berpolitik yang baik dan benar. Dalam hal ini PPP mengusung 21 kandidat perempuan calon legislatif di Kabupaten Gresik, dalam hal ini PPP sudah memenuhi kuota yang diwajibkan oleh KPU Kabupaten Gresik. PPP mengusung 50 kandidat, laki-laki sebanyak 29 dan perempuan sebanyak 21. PPP optimis bisa memenangkan pemilihan yang akan mendatang. Calon legislatif baik laki laki dan perempuan akan membuat strategi kemenangan di setiap daerah pemilihannya. Daerah pemilihan I di isi 7 calon legislatif, yang berdomisili Kecamatan (Gresik-Kebomas), Dapil II di isi 5 calon legislatif yang berdomisili Kecamatan (Cerme-Duduk sampean), Dapil III di isi 7 calon legislatif yang berdomisili Kecamatan (Menganti-Kedamean), Dapil IV di isi 7 calon legislatif yang berdomisili Kecamatan (Driyorejo-Wringinanom Anom), Dapil V di isi 5 calon legislatif yang berdomisili Kecamatan (Benjeng-Balongpanggang), Dapil VI di isi 4 calon legislatif yang berdomisili (Bawean), Dapil VII di isi 6 calon legislatif yang berdomisili Kecamatan (Dukun-Ujung Pangkah-Panceng) dan yang terakhir Dapil VIII di isi 9 calon legislatif yang berdomisili Kecamatan (Manyar- Bungah- Sidayu).

Syarat menjadi caleg PPP di semua wilayah Indonesia adalah sama, atau tidak ada perbedaan, oleh karenanya para calon legislatif akan memenuhi berbagai syarat yang sama. Syarat yang pertama, sebagaimana ditetapkan dan di implementasikan pada DPC PPP Kabupaten Gresik, adalah keharusan untuk setiap calon legislatif yang mendaftar di PPP haruslah seorang muslim (beragama Islam). Kebutuhan ini berdasarkan pada pasal 2 AD/ART PPP, bahwa: “PPP berasaskan

Islam”. Oleh karena itu, PPP mengharuskan para calon legislatif harus beragama Islam. Tidak hanya pada calon legislatif, akan tetapi juga pada seluruh pengurus dan kader-kader PPP merupakan umat Islam. Sejak dulu sampai sekarang, PPP terus konsisten pada dasarnya yang berpegang teguh pada agama Islam. Tentunya, PPP sebagai partai awal yang terlahir dengan asas Islam, PPP menginginkan menjaga konsistensi tersebut. Di samping itu, di dalam internal ini juga berisi para kyai dan ulama yang terkenal, sehingga Islam di dalam PPP sangat kental dan sulit untuk pudar.⁵

Syarat kedua yang juga penting adalah kewajiban setiap calon legislatif, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) partai. Harapannya dengan memiliki KTA tersebut berarti dirinya telah menjadi keluarga besar PPP.

Syarat terakhir yang wajib dipenuhi para calon legislatif perempuan adalah sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani maksudnya sehat dari segi fisik sebelum para calon legislatif perempuan mendaftarkan diri, tidak terdapat penyakit parah atau cacat permanen yang dideritanya. Sehat rohani lebih terletak pada kesehatan psikologi dan kejiwaannya, semisal tidak pernah menderita kelainan kejiwaan seperti gila.⁶

Untuk rekrutmen calon legislatif perempuan hampir sama dengan rekrutmen caleg pria, yang membedakan hanya pada mandat yang diberikan kepada organisasi PPP. Dalam rekrutmen calon legislatif perempuan, mandat yang diberikan terfokus kepada organisasi sayap WPP (Wanita Persatuan Pembangunan) sebagai wadah berkumpulnya para kader perempuan PPP. WPP sendiri memang berfokus pada kader perempuan PPP dimana kegiatan organisasi tersebut untuk memberdayakan perempuan PPP. Sehingga sangat pas apabila mandat dari DPC PPP turun ke WPP Kabupaten Gresik untuk mengusulkan kadernya bisa pengurus harian atau anggotanya untuk menjadi salah satu daftar calon legislatif perempuan⁷ Bermula dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengamati strategi rekrutmen Partai Persatuan Pembangunan dalam meningkatkan partisipasi perempuan.

⁵ AD/ART PPP Bab II Ayat 2 (Asas, Sifat, dan Prinsip Perjuangan) Tahun 2016

⁶Ibid

⁷Mari Rosieana. *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Gresik Studi*

Metode Penelitian

Dalam penyusunan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.⁸ Peneliti berusaha menuliskan secara deskriptif makna strategi rekrutmen calon legislatif perempuan pada pemilu 2019 (Studi Kasus DPC PPP Gresik). Lokasi penelitian ini dilakukan di DPC PPP Kabupaten Gresik, dan dilakukan dalam kurun waktu sekitar 3 bulan di mulai pada bulan Oktober s/d Desember 2018 di kantor DPC PPP Gresik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus.⁹ Subjek penelitian yang diambil adalah orang yang terlibat atau memiliki pengetahuan yang luas tentang strategi rekrutmen PPP dalam meningkatkan partisipasi perempuan caleg legislatif di Kabupaten Gresik.

Adapun teknik penentuan subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.¹⁰ Subjek penelitian yang dimaksud adalah anggota partai PPP DPRD Kabupaten Gresik dan calon legislatif Kabupaten Gresik, antara lain:

Daftar Narasumber		
1.	Ketua DPC PPP	: Achmad Nadhir
2.	Wakil DPC PPP	: H. Murtadlo Nur
3.	Sekretaris DPC PPP	: Khoirul Huda (Calon Legislatif)
4.	Bendahara DPC PPP	: Lilik Hidayati
5.	Ketua Pemenangan Pileg	: Khorul Huda

⁸ Suharsimi Arikunto. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Rieka Cipta: Jakarta, 1996), Hal.129.

⁹ James Spradley, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997) Hlm 61-70

¹⁰ Afifuddin Dan Beni Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Hal 88.

6.	Staf Pendaftaran Caleg	: Ali Mahmudi (Calon Legislatif)
7.	Calon Legislatif DPRD Gresik yang di wawancara :	
	a.	Lilik Hidayati (DPRD berserta Calon Legislatif)
	b.	Hj. Menik Maratus Sholiha (Calon Legislatif)
	c.	Mifathul Jannah (Caleg Legislatif)

Penyusunan artikel ini dilakukan dengan dua tahap, *Pertama* tahap pra lapangan, menyusun rancangan penelitian Pada tahap ini peneliti membuat proposal penelitian, memilih lapangan penelitian, mengajukan surat permohonan (kesediaan) yang ditujukan kepada DPC PPP Kabupaten Gresik dan pengurus PPP. *Kedua* tahap lapangan, wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, menyusun laporan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah model interaktif.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Partai Persatuan Pembangunan

Sebagai salah satu peserta pemilu legislatif 2019, Partai Persatuan Pembangunan di Kota Gresik melakukan rekrutmen calon legislatif baik perempuan maupun laki laki. Sebuah tanggung jawab dari DPC PPP Kota Gresik untuk melaksanakan rekrutmen bakal calon legislatif yang berasal dari internal PPP. Kader – kader PPP baik laki laki maupun perempuan yang menonjol menjadi prioritas bagi Pengurus Harian dan LP2 (Lazma Pemenangan Pemilu) selaku panitia rekrutmen untuk mengusung para kader tersebut menjadi calon legislatif. Tentu semua itu tergantung pada kadernya bersedia diusung atau tidak, sehingga PPP sendiri tidak melanggar hak asasi dari kader tersebut. Di lain kesempatan, peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris DPC PPP Gresik terkait Strategi partai PPP untuk bisa mendapatkan kursi lebih banyak.

“Yang pertama harus di pahami sistem pemilu, dan sistem pemilu sekarang terbuka. Siapapun bisa di rekrut menjadi anggota legislatif, maka strategi yang di lakukan oleh PPP yakni mencari figur-figur yang bisa di lihat dari masyarakat, layak di jual di masyarakat, mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Agar program PPP itu bisa berjalan, maka calon anggota legislatif tidak boleh ada yang mantan napi. Dan tak kalah dengan caleg lainnya, di sini caleg perempuan juga sangat unggul dan mempunyai integritas tinggi. Di sini saya sebagai ketua LP2 kita memasang calon-calon perempuan yang sudah mempunyai integritas, mereka punya pengalaman ataupun jadi tokoh-tokoh masyarakat, seperti Ketua Muslimat, ada Pengurus Muslimat, bahkan ada yang milenial. Meskipun dia gak pengalaman tapi ini anak muda. Kenapa kita pasang anak muda? Misalnya kayak caleg Balopanggang ini kan milenial usianya masih 21 an sampai 25 an, kenapa PPP memasang kader milenial agar tidak ada kesan partai orang tua. Dulu orang melihat kalau PPP partai wong tuwo, sekarang tidak sekarang anak muda harus sudah tampil. Apakah nanti berhasil? Itu urusan nanti, tetapi kita butuh kaderisasi. Pileg 2019 gagal, bisa 2024. Itu kan yang penting ada pengalaman sehingga harapan saya itu yang milenial nggak berputus asa ketika tidak jadi, tetapi ini sebagai cambuk buat pengalaman.”¹¹

Dari wawancara di atas, bahwasanya PPP juga mempunyai strategi khusus agar bisa menarik para calon legislatif baru, khususnya calon legislatif perempuan yang layak untuk di konteskan di pemilihan legislatif. Bukan dari kader yang hanya mempunyai figur tokoh masyarakat seperti Muslimat, tetapi dari kalangan anak muda juga ada yang di calonkan oleh DPC PPP agar bisa menjadi kader milenial yang berintegritas tinggi. Tidak hanya itu saja, menurut Ketua LP2, mereka meyakinkan kepada kader perempuan, bahwasanya pantas untuk di calonkan dan di pilih. Maka dari itu, dari pemikiran teori dari Pater Schroeder mengenai ilmu tentang teknik, taktik dan cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan,

¹¹ Wawancara dengan Sekretaris DPC PPP Gresik Khoirul Huda, di kediaman Suci, Manyar, Gresik, 12 Desember 2018, jam 17.00 wib.

merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan wajib kita manfaatkan untuk bagaimana taktik kita bisa mendapatkan kursi perempuan lebih banyak lagi.

1. Membentuk Laznah Pemenangan Pemilu (LP2)

Di partai PPP terdapat sebuah lembaga khusus untuk menangani proses awal pendaftaran sampai kemenangan pemilihan legislatif yang di namakan pengurus LP2 (Laznah Pemenangan Pemilu). LP2 selaku panitia rekrutmen mengusung para kader partai tersebut menjadi calon legislatif. Tujuan di bentuknya pengurus LP2 agar setiap calon legislatif yang di calonkan memang benar-benar berkompoten dan pantas di majukan menjadi calon legislatif.

Program LP2 yakni mendata Pendaftar Calon Sementara yang selanjutnya disebut DCS dan menyusun nama-nama yang dibuat LP2 sesuai tingkatannya untuk disampaikan kepada LPC. LPC berwenang menyusun daftar calon legislatif tetap (DCT) sesuai tingkatannya. Anggota LP2 terdiri dari pengurus inti dan pengurus harian sesuai tingkatannya yang dinilai mampu melakukan tugas dan tanggungjawab persiapan Pemilu.

Tabel 1.3.

Daftar Nama Pengurus LP2

Nama	Jabatan
H. Choirul Huda	Ketua LP2
H. Murtadlo Nur SH	Wakil LP2
Hj. Lilik Hidayati	Bendahara

Sumber: DPC PPP Gresik

Dari tabel di atas bahwasanya nama-nama yang menjadi pengurus inti mempunyai tanggung jawab tinggi untuk bisa mengordinir para anggota calon legislatif lain agar lebih semangat dan lebih yakin kalau PPP pantas mendapatkan kursi lebih banyak.

2. Sosialisasi Pendaftaran Calon Legislatif

a. Cara Sosialisasi

Terdapat cara atau strategi sosialisasi yang di gunakan untuk mencari kader-kader yang layak untuk di kontestasikan. DPC sebelumnya sudah menyerahkan tanggung jawab di setiap PAC per kecamatan untuk mencari kader-kader yang cocok untuk maju ke pencalonan legislatif. Baik dari kalangan perempuan atau laki- laki semua sudah di serahkan ke PAC masing masing. DPC sendiri membuat banner di setiap kecamatan guna membuka secara umum pendaftaran calon legislatif. Di samping itu, DPC Partai secara struktur memberikan intruksi kepada PAC untuk menjalin komunikasi dengan tokoh partai di wilayahnya masing-masing. Di lain kesempatan, peneliti juga melakukan wawancara terkait cara sosialisasi DPC dan pendaftaran calon legislatif PPP Gresik.

“Disini kami pengurus DPC mensosialisasikan terkait pendaftaran caleg dengan adanya banner di setiap kecamatan itu sudah sangat membantu mengumumkan pendaftaran caleg dengan di tambahkan lagi adanya pengurus PAC yang sangat semangat mencari kader kader yang pastinya cocok untuk di pentaskan menjadi caleg 2019 dan mempunyai figur yang baik.”¹²

Wawancara di atas menjelaskan bahwasanya DPC sudah memberikan tugas kepada PAC masing masing kecamatan guna mencari figur yang cocok untuk di kontestasikan di pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Gresik.

b. Tempat dan Waktu Pendaftaran

Setiap PAC masing masing mempunyai formulir pendaftaran yang langsung di berikan oleh DPC. Semua calon legislatif yang ingin mendaftar bisa melalui kantor DPC atau PAC di wilayah masing masing. Pendaftaran tidak di pungut biaya, dan diwajibkan harus mempunyai kartu anggota partai dan beragama Islam. Waktu pendaftaran bisa dilakukan kapan saja asalkan tidak melebihi batas akhir yang di berikan oleh DPC atau KPU Gresik. Pendaftaran di mulai pada tanggal 4 – 17 Juli 2019.

¹² Wawancara dengan Ali Mahmudi, di kediaman Menganti, Gresik, 10 Desember 2018, jam 17.00 wib.

c. Syarat Pendaftaran Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan

Terdapat persyaratan yang harus di laksanakan bagi setiap calon legislatif, baik perempuan maupun laki laki.

LAZNAH PEMENANGAN PEMILU

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan

- dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
 - o. Dicalonkan hanya di i (satu) lembaga perwakilan dan
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
2. Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. Surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
 - g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;

- h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh I (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwalkilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup; dan
- k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada I (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.¹³

Dari paparan di atas, bahwasanya setiap calon legislatif harus memenuhi persyaratan di atas agar bisa terdaftar menjadi caleg tetap anggota legislatif mendatang. Di lain kesempatan peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris DPC PPP Gresik dan ketua LP2 Gresik terkait rekrutmen calon legislatif perempuan.

“Kita kan punya pengurus mulai dari tingkat DPC, PAC sampai Ranting. Struktur ini berkewajiban bagaimana mengajak masyarakat untuk mau masuk ke PPP, dengan mekanisme yang ada dan mekanismenya seperti ketika masyarakat mau membuat kartu anggota kita langsung membuatkan. Selanjutnya, kita menawarkan program-program partai kedepan itu seperti apa, sehingga masyarakat bisa menilai dan mekanisme antara caleg perempuan dan caleg laki laki sama aja kita tidak membedakan adanya mekanisme atau yang lainnya.”¹⁴

Dari wawancara di atas, bahwasanya DPC sudah membagi tugasnya ke PAC sampai ke Ranting. Dari situlah setiap PAC dan Ranting mencari kandidat yang cocok untuk di calonkan dan bisa menerapkan program-program DPC PPP ke masyarakat. Tak kalah penting, DPC tidak

¹³ Form pengurus LP2 DPC PPP Kabupaten Gresik

¹⁴ Wawancara dengan Khoirul Huda, di kediaman Suci, Manyar, Gresik, 12 Desember 2018, jam 17.00 wib.

membedakan adanya mekanisme yang ada semua calon legislatif perempuan ataupun laki laki semua di samakan baik mekanisme atau yang lainnya.

3. Nama Calon Legislatif yang Mendaftar

Dan adapun di bawah nama-nama pendaftar Anggota Legislatif 2019 yang sudah di setujui oleh KPU Gresik sebagai berikut:

Tabel 1.4.

Pendaftaran Calon Anggota Legislatif 2019 di DPC PPP Gresik

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Posisi yang Di Tuju	Daerah atau Dapil
1	Hj.Lilik Hidayati, SE,MM	Gresik	12-07-1963	P	DPRD	Gresik I
2	Nur Azizah Febrianti	Gresik	28-02-1982	P	DPRD	Gresik I
3	Siti Munawaroh	Gresik	17-04- 1976	P	DPRD	Gresik I
4	Mohammad Hasan	Gresik	07-05-1973	L	DPRD	Gresik I
5	Maksum, S. Pd	Jombang	11-04-1958	L	DPRD	Gresik I
6	Zainal Abidin	Gresik	04-03-1968	L	DPRD	Gresik I
7	Abdul Wahab	Gresik	16-10-1973	L	DPRD	Gresik I
8	Rojikhus Syahir	Gresik	20-01-1983	L	DPRD	Gresik II
9	Mukaukabah Alwadlo	Gresik	24-04-1997	P	DPRD	Gresik II
10	Lutfi Syarifuddin	Gresik	26-06-1985	L	DPRD	Gresik II
11	Choirah, SH	Gresik	04-04-1961	P	DPRD	Gresik II
12	Abdul Basyid	Gresik	04-06-1977	L	DPRD	Gresik II
13	Ali Mahmudi	Gresik	06-03-1975	L	DPRD	Gresik III

14	Muhammad Yunus	Gresik	13-07-1974	L	DPRD	Gresik III
15	Dewi Ayumi	Gresik	31-07-1970	P	DPRD	Gresik III
16	Laode Maulidin Aziz	Gresik	04-06-1970	L	DPRD	Gresik III
17	Lailatul Munawaroh	Gresik	31-01- 1987	P	DPRD	Gresik III
18	Siti Mualifah	Gresik	10-12-1980	P	DPRD	Gresik III
19	Budi Lestari	Pati	21-09-1975	P	DPRD	Gresik III
20	H. Sumardi	Gresik	15-08-1961	L	DPRD	Gresik IV
21	Abdul Aziz	Gresik	11-02-1965	L	DPRD	Gresik IV
22	Vita Putriastuti	Gresik	12-01-1982	P	DPRD	Gresik IV
23	Ning Ayu Dyah Pamungkas	Gresik	25-05- 1995	P	DPRD	Gresik IV
24	Faisol	Gresik	18-07-1986	L	DPRD	Gresik IV
25	Moh Tamami Alislah	Gresik	27-02- 1989	L	DPRD	Gresik IV
26	Vivin Novalia	Gresik	16-09-1982	P	DPRD	Gresik IV
27	Mustaqim	Gresik	16-12-1960	L	DPRD	Gresik V
28	Miftahul Jannah	Gresik	01-11-1993	P	DPRD	Gresik V
29	Sriono	Gresik	07-12-1974	L	DPRD	Gresik V
30	Nurjanah	Lamongan	19-07-1994	P	DPRD	Gresik V
31	Winadi	Gresik	02-12-1970	L	DPRD	Gresik V
32	Esfar	Gresik	12-01-1975	L	DPRD	Gresik VI
33	Mardino	Yogyakarta	25-01-1966	L	DPRD	Gresik VI
34	Misnamah	Gresik	27-04-1987	L	DPRD	Gresik VI
35	Lies Farhatin	Gresik	22-04-1976	P	DPRD	Gresik VI
36	H. Anwar Sadad	Gresik	09-04-1957	L	DPRD	Gresik VII
37	Izzatun Nisa	Gresik	10-12-1984	P	DPRD	Gresik VII

38	Rezza Kassih Pratama	Gresik	14-02-1995	L	DPRD	Gresik VII
39	Lutfiatul Husna	Gresik	25-09-1976	P	DPRD	Gresik VII
40	Mohammad Zaenal Abidin	Gresik	09-01-1981	L	DPRD	Gresik VII
41	Ihwanudin	Gresik	06-06-1978	L	DPRD	Gresik VII
42	Khoirul Huda	Gresik	05-06-1976	L	DPRD	Gresik VIII
43	Suparno	Gresik	23-12-1975	L	DPRD	Gresik VIII
44	Hj. Menik Maratus Sholiha	Surabaya	31-08-1960	P	DPRD	Gresik VIII
45	H. Muhammad Nukman	Gresik	27-01- 1971	L	DPRD	Gresik VIII
46	Muhammad Kholili	Gresik	08-04- 1978	L	DPRD	Gresik VIII
47	Nisfi Romadhon	Tuban	07-07- 1982	P	DPRD	Gresik VIII
48	Anida Norma Mujahida	Gresik	28-09-1996	P	DPRD	Gresik VIII
49	Abd Hasib	Gresik	5-10-1975	L	DPRD	Gresik VIII
50	Nasihudin	Gresik	30-10-1967	L	DPRD	Gresik VIII

Sumber : DPC PPP Gresik (2018)

Dari tabel berikut, bahwasanya nama-nama bakal calon legislatif anggota DPRD 2019-2024 DPC Gresik sudah memenuhi persyaratan, yaitu semua bakal calon legislatif lolos dan bisa mengikuti tahap selanjutnya yang kemudian di umumkan oleh pihak KPU Gresik.¹⁵

¹⁵ Dokumen DPC PPP Gresik, penetapan caleg 2019-2024.

Penentuan Nomor Urut dan Daerah Pemilihan Calon Anggota Legislatif

Berikut ini adalah skor angka penentuan nomor urut menurut DPC Partai Persatuan Pembangunan.

Tabel 1.5.

Score Angka Penetapan Nomor Urut Caleg PPP Kab. Gresik Pemilu 2019

1	Ketua DPC	100
2	Sekretaris DPC	90
3	Bendahara DPC	80
4	Pengurus Harian DPC (Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara)	70
5	Ketua Majelis DPC	70
6	Sekretaris Majelis DPC	60
7	Anggota Majelis DPC	50
8	Ketua Fraksi	70
9	Anggota Fraksi	60
10	Ketua LP2	70
11	Anggota LP2	60
12	Ketua PC WPP	70
13	Sekretaris PC WPP	60
14	Bendahara PC WPP	50
15	Ketua PAC	70

16	Sekretaris PAC	60
17	Bendahara PAC	50
18	Pengurus Harian PAC (Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara)	40
19	Tokoh Eksternal (NU, Muhammadiyah, GP Anshor, dll)	50

Sumber: DPC PPP Gresik

Dari tabel di atas, bahwasanya skor angka penentu nomor urut yang sudah di sahkan oleh anggota DPC PPP Gresik. Disini diketahui tidak ada calon legislatif yang mungkin curiga dengan adanya ketidakadilan yang di lakukan DPC kepada para calon legislatif. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap caleg mengenai penentuan nomer urut caleg.

“Ya kalau kayak gitu menurut saya ya nomor urut itu gak penting ya nanti kan kita pengenalnya ke masyarakat, meskipun kita nomor urut 5 tapi kalo di masyarakat di percaya kan nanti di ingat-ingat. Jadi saya gak masalah.”⁴⁷

Menurut calon legislatif, nomor urut tidak di permasalahan di pemilihan legislatif. Yang lebih pentingnya hanya bagaimana calon legislatif bisa terjun langsung dan di nilai masyarakat.

Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian dengan judul “Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu 2019 (Studi Kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Gresik)”. Tentang rekrutmen yang dilakukan partai politik sendiri, yakni strategi rekrutmen calon legislatif yang dilakukan PPP Gresik adalah membentuk Laznah Pemenangan Pemilu (LP2), sosialisasi pendaftaran calon legislatif, penentuan nomor urut dan dapil calon legislatif, pembekalan calon legislatif, forum konsultasi pemenangan calon legislatif, bantuan alat peraga kampanye, penyediaan saksi per TPS, evaluasi *progress report* calon legislatif. Partai politik akan melakukan rekrutmen sebaik-baiknya dan seketat mungkin, sehingga bakal calon legislatif yang lolos benar – benar terbaik. Selain itu terdapat mekanisme khusus untuk mendaftar ke DPC yang paling penting, yakni setiap calon legislatif yang mau mendaftar harus beragama

Islam, serta bisa memperjuangkan visi misi ke masyarakat. Kemudian terdapat beberapa penghambat strategi rekrutmen calon legislatif perempuan, yakni minimnya minat perempuan untuk mencalonkan diri, minimnya pengetahuan dan keterampilan berpolitik, kurangnya dana kampanye, minimnya jaringan sosial dan keterbatasan waktu kampanye dan hambatan eksternal antara lain pandangan masyarakat terhadap calon legislatif.

Daftar Pustaka

Amal, Ichlasul *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta 2014)

Budiarjo Mirriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Cangara Hafied *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi*. Jakarta: 25 Januari 2011
Rajawali Pers.

Crotty William and Katz Richard *Handbook Of Party Politice* (London: Sagen Publications 2015).

Firmanzah, *Marketing Politik, Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012.

Form pengurus LP2 DPC PPP Kabupaten Gresik.

Herbert McClosky, *Political Participation*, Dan Miriam Budiarjo, *Partisipasi Dan Partai Politik* Jakarta.

Hesel Nogi Tangkilisan, 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, eew11 Yogyakarta (Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia 2003).

Huntion P Samuel, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, (Jakarta: Grafitri, 1997).

Kasali *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan Implementasi Dan Pengendalian*, (Erlangga, Jakarta, 2013).

Ketetapan muktamar VI PPP Tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga , Jakarta 2007.

Kotler, Philip *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan Implementasi Dan Pengendalian*, (Erlangga, Jakarta, 2000).

M. Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Schroeder Peter, *Strategi Politik* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2009). Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran, Dasar, Konsep Dan Strategi*, (Rajawali Press, Jakarta, 2001).

Surat Keputusan PPP “*Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPC PPP Kab Gresik masa bakti 2016-2021*”.

Suratno Bondan dan Rismianti, *Pemasaran Barang Dan Jasa*, Kanisius, (Yogyakarta, 2001).

Surbakti Ramlan *memahami ilmu politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widisusarana, 1992).

Teguh Ilham /Dr. Labodo Muhadam , *S.Stp Partai Politik Dan System Pemilihan Umum Di Indonesia*. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 2013).

Tim Litbang Kompas, *partai partai politik Indonesia*, (Jakarta PT. Kompas media Nusantara, 1999)

Auliyah Hikmatul, “*Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan Dalam Sukseskan Kepemimpinan Negara Pada Pemilu 2014*” (skripsi, Fisip Undip 2014).

Dokumen DPC PPP Gesik, penetapan caleg 2019-2024.

Dominic Wring, *Reconciling Marketing With Political Science: Theories Of Political Marketing*, (Journal Of Marketing Management, 1997, Vol 13).

Drs. S Amsir, M.Si Dengan “*Implemtasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Politik Di Kota Padang*” (jurnal Fisip UNP) hlm 14-15 vol 16 no 2 thn 2014.

Hadi Atmaja Reza M “*Analisa Proses Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Kota Semarang (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan)*” (jurnal,Fisip Undip 2014) Hlm 24-29 Website : [Http://Www.Fisip.Undip.Ac.Id](http://Www.Fisip.Undip.Ac.Id) Email : Fisip@Undip.Ac.Id.

Hendrawati “*Rekrutmen Perempuan Menjadi Politisi (Legislatif)*” (jurnal penelitian pers dan komunikasi pembangunan) banjarmasin hlm 131 vol 18 no 2 thn 2014.

Lampiran surat NO: 8/7272 / LHK.00.02./10-12/09/2018.

Rofieq Ainur *Fungsi Rekrutmen Politik Pada Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 2, (2011).

Rosieana Mari *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Gresik Studi Pada Anggota DPRD Kabupaten Gresik*. Ejournal Pemerintah Integratif Vol. 1 No. 1, thn 2013.

Reconciling, Wring, Dominic *Marketing With Political Science: Theories Of Political Marketing*, (Journal Of Marketing Management, 1997, Vol 13).

Silvana Nuri Dengan Judul “*Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Dan Pencalonan Legislatif*” (skripsi Fisip Unsoed purwokerto2013).

Sirine Hani *Jurnal Segmenting, Targeting, And Positioning Strategy, Price Strategy*, Vol. 01, No. 03, September 2016